

PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
KABUPATEN SUKAMARA

RENCANA STRATEGIS
TAHUN 2025 - 2029



DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
KABUPATEN SUKAMARA
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukamara merupakan dokumen awal perencanaan yang bersifat indikatif dan memuat berbagai program pembangunan Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukamara dalam kurun waktu tahun 2025 - 2029, dengan penekanan pada pencapaian sasaran Prioritas Nasional, Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Sustainable Development Goals (SDGs). Tantangan dan permasalahan pembangunan Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian makin bertambah berat, kompleks dan bahkan terkadang tidak terduga. Oleh sebab itu pembangunan Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dilaksanakan dengan memperhatikan dinamika masyarakat.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta globalisasi dan demokratisasi dengan semangat kemitraan, kerjasama lintas sektoral serta mendorong peran serta aktif masyarakat. Melalui kesempatan ini, saya mengajak kepada semua unsur Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukamara untuk saling bahu-membahu dalam menyelenggarakan Informasi dan Komunikasi Publik. Semoga upaya kita mendapat Rahmat dan Hidayah-Nya. Amin.

Sukamara, Mei 2025

Kepala Dinas
Komunikasi Informatika dan Persandian
Kabupaten Sukamara



DENNY YUDHISTIRA KURNIAWAN, S.I.P
NIP. 19750708 200312 1 009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	
2.1 Perangkat Pelayanan Daerah	
2.1.1 Tugas Fungsi dan Struktur PD	7
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	14
2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	23
2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan	26
2.2 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	
2.2.1 Permasalahan.....	26
2.2.2 Isu Strategis	28
BAB III TUJUAN SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN	
3.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator	30
3.2 Arah Kebijakan.....	33
3.3 Kebijakan Perangkat Daerah	40
BAB IV RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA RENCANA PENDANAAN	
4.1 Program Kegiatan	41
4.2 Indikator Kinerja Utama	54
4.3 Indikator Kinerja Daerah	55

	4.4 Indikator Kinerja Kunci	56
BAB V	PENUTUP	57

.

DAFTAR TABEL

Tabel2.1 Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan.....	15
Tabel 2.2 Sarana dan Prasarana Perkantoran.....	15
Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan	25
Tabel 2.4 Isu Strategis	28
Tabel 3.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator.....	31
Tabel 3.2 Arah Kebijakan PD	33
Tabel 3.3 Kebijakan Perangkat Daerah.....	40
Tabel 4.1 Program, Kegiatan dan Pendanaan	42
Tabel 4.2 Indikator Kinerja Utama	53
Tabel 4.3 Indikator Kinerja Daerah	53
Tabel 4.4 Indikator Kinerja Kunci.....	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 SOTK 9

Gambar 2.2 Peta Jabatan 14

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 tahun kedepan sehubungan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis yang digunakan untuk melakukan proyeksi Perangkat Daerah kondisi pada masa depan. Di dalam awama Renstra digambarkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang merupakan proses berkelanjutan dari pembuatan keputusan.

Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian sesuai Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Sukamara yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukamara Tahun 2025 - 2029, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Sukamara Tahun 2005 - 2025, dan dengan mempertimbangkan perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), serta trend komunikasi dan partisipasi publik yang dipengaruhi oleh perkembangan TIK tersebut, dan guna mendorong dan mempercepat pengejawantahan dua aspek di atas.

Untuk menjamin seluruh proses komunikasi dan pelayanan publik ini berlangsung secara efektif, efisien, mudah, dan murah, ia ditunjang dengan penerapan e-Government baik di lingkungan Pemerintah Pusat maupun Daerah yang sebelumnya telah dikembangkan dengan dikeluarkannya Inpres Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government.

Pembagian Urusan Pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Dearah maka Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian mempunyai 3 (tiga) urusan wajib konkuren non-pelayanan dasar dari 18 (delapan belas) urusan wajib non -Yandas yaitu Kominfo, Statistik dan Persandian dan dijabarkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016

tentang Perangkat Daerah dan Pemerintah Kabupaten Sukamara membuat Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 54 tahun 2022 tentang Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sukamara Nomor 54 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukamara.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

A. Landasan Formil

Landasan penyusunan Rencana Strategis Dinas Kominfosandi Kabupaten Sukamara 2025 - 2029, antara lain :

Landasan Idiil : Pancasila
Landasan Konstitusional : Undang-Undang Dasar 1945

B. Landasan Operasional

1. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang 2002 tentang Penyiaran Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

- dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Perpres Nomor 29 tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 7. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2002 tentang Tim Telematika Indonesia;
 8. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pengembangan eGovernment;
 9. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 10. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887 ;
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik;
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4566)

17. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 14 tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi Dan Informatika;
22. Peraturan Kepala Badan Statistik Nomor 9 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektorial oleh Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 8 tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah Di Bidang Persandian;
24. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Persandian;
25. Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sukamara Nomor 54 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukamara

C. Landasan Materiil

Masukan, saran, pendapat, dan aspirasi seluruh pejabat Struktural sebagai hasil perumusan Visi dan Misi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukamara.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukamara dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan yang memuat arah kebijakan, program, kegiatan, dan tolak ukur kinerja Dinas Komunikasi Informasi dan Persandian Kabupaten Sukamara dalam pencapaian Visi dan Misi serta Tujuan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian untuk mendukung tercapainya Visi, Misi, dan Tujuan Pemerintah Kabupaten Sukamara Tahun 2025 - 2029.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukamara adalah “Kinerja yang menggambarkan selama 5 (lima) tahun untuk menggambarkan ketermafaatan Perangkat Daerah berdasarkan Norma, Standar, Prosedur dan Kreteria (NSPK) yang di terbitkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau memperhatikan sasaran RPJMD tahun 2025-2029”

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukamara adalah :

1. Sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis tahun 2025-2029;
2. Sebagai upaya menyelaraskan RPJMD tahun 2025-2029 dengan Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukamara tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini memuat :

- 1.1 Latar Belakang penyusunan Renstra Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian sebagai penjabaran RPJMD dan Renstra Nasional yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukamara.
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan adalah perihal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyusunan Renstra.

1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra.

1.4 Sistematika Penulisan Penyusunan Renstra.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Perangkat Pelayanan Daerah

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah, Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya.

BAB IV RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA RENCANA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif.

BAB V PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan UU nomor 23 Tahun 2014 tentang Perangkat Daerah, Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian mempunyai 3 (tiga) Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar. Tugas pokok Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukamara adalah **"MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI INFORMATIKA, BIDANG STATISTIK DAN BIDANG PERSANDIAN"**.

Uraian tugasnya diatur dalam 25. Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sukamara Nomor 54 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukamara, untuk menyelenggarakan tugas pokok Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukamara mempunyai fungsi sebagai berikut :

2.1 Perangkat Pelayanan Daerah

2.1.1 Tugas Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Sebagaimana yang tertera dalam Peraturan Bupati Sukamara Nomor 54 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukamara.

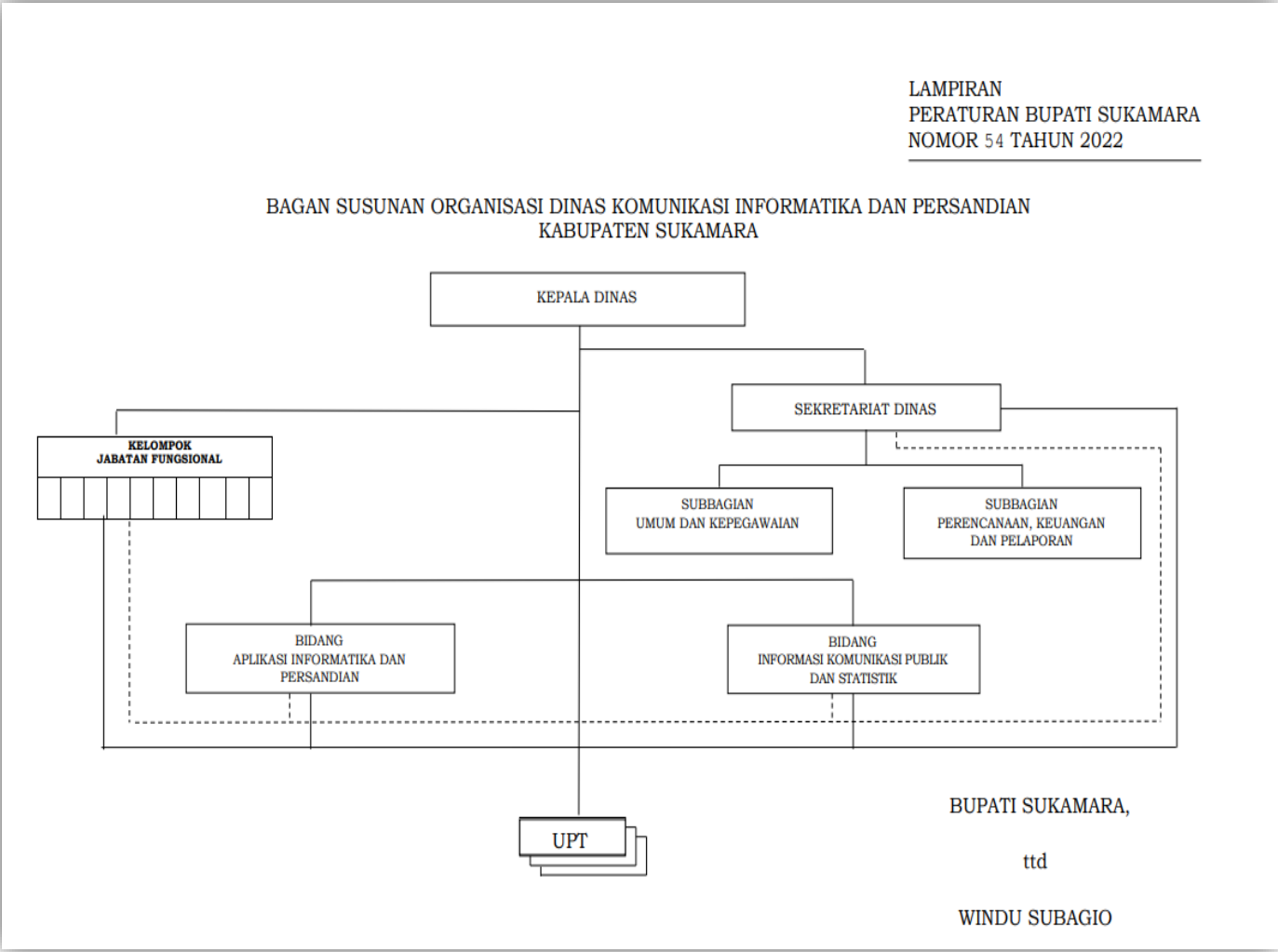
Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah, Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukamara menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan urusan bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. pengoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
- c. pengoordinasian penyelenggaraan program informasi dan

- komunikasi publik;
- d. pengoordinasian penyelenggaraan program aplikasi informatika;
 - e. pengoordinasian penyelenggaraan program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi;
 - f. pengoordinasian penyelenggaraan program penyelenggaraan statistik sektoral;
 - g. pelaksanaan administrasi pendapatan daerah yang menjadi kewenangan Dinas;
 - h. pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Dinas;
 - i. pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas;
 - j. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Dinas;
 - k. pengoordinasian penatausahaan arsip di lingkungan Dinas;
 - l. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, dan zona integritas Dinas;
 - m. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
 - n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas Dinas.

Struktur Organisasi Dinas Komunikasi Informatika DAN Persandian Kabupaem Sukamara berdasarkan Keputusan Bupati Sukamara No. 54 tahun 2022 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kab Sukamara dapat dilihat pada gambar 2.1

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian
Kabupaten Sukamara



Sumber Arsip Dinas Kominfosand

Sebagaimana tercantum Keputusan Bupati Sukamara Nomor 54 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukamara. Dinas mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan urusan bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. pengoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
- c. pengoordinasian penyelenggaraan program informasi dan komunikasi publik;
- d. pengoordinasian penyelenggaraan program aplikasi informatika;
- e. pengoordinasian penyelenggaraan program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi;
- f. pengoordinasian penyelenggaraan program penyelenggaraan statistik sektoral;
- g. pelaksanaan administrasi pendapatan daerah yang menjadi kewenangan Dinas;
- h. pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Dinas;
- i. pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas;
- j. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Dinas;
- k. pengoordinasian penatausahaan arsip di lingkungan Dinas;
- l. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, dan zona

- integritas Dinas;
- m. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
 - n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas Dinas.

Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. pengoordinasian kegiatan perencanaan, penyusunan program, penganggaran, dan evaluasi kinerja Dinas
- b. pengoordinasian penyelenggaraan administrasi keuangan Dinas pengoordinasian penyelenggaraan administrasi barang milik daerah pada Dinas;
- c. pengoordinasian penyelenggaraan administrasi kepegawaian Dinas;
- d. pengoordinasian penyelenggaraan administrasi umum Dinas;
- e. pengoordinasian pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah;
- f. pengoordinasian penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah;
- g. pengoordinasian pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah;
- h. pelaksanaan administrasi pendapatan daerah yang menjadi kewenangan Dinas;
- i. pengoordinasian fasilitasi Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas;
- j. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi terkait kerja sama, hubungan masyarakat, publikasi dan dokumentasi;
- k. pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, dan zona integritas Dinas;
- l. pengoordinasian pemantauan, evaluasi,

- pengendalian dan penilaian atas capaian pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Dinas; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas Dinas.

Bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Statistik mempunyai fungsi :

- a. pengoordinasian perencanaan program dan kegiatan pada Bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Statistik;
- b. pengoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis terkait pelaksanaan Informasi, Komunikasi Publik dan Statistik;
- c. pengoordinasian pengelolaan informasi dan komunikasi publik Daerah;
- d. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah;
- e. Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah
- f. penatausahaan arsip di Bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Statistik;
- g. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan program dan kegiatan di Bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Statistik; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas Dinas.

Bidang Aplikasi Informatika dan Persandian:

- a. pengoordinasian perencanaan program dan kegiatan di Bidang Aplikasi Informatika dan Persandian;
- b. pengoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis terkait bidang Aplikasi Informatika dan Persandian;
- c. pengoordinasian penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Daerah;

- d. pengoordinasian pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Daerah;
- e. pengoordinasian pengelolaan e-government Daerah
- f. penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah;
- g. Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah
- h. penatausahaan arsip di Bidang Aplikasi Informatika dan Persandian;
- i. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan program dan kegiatan pada Bidang Persandian dan Statistik;
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas

2.1.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

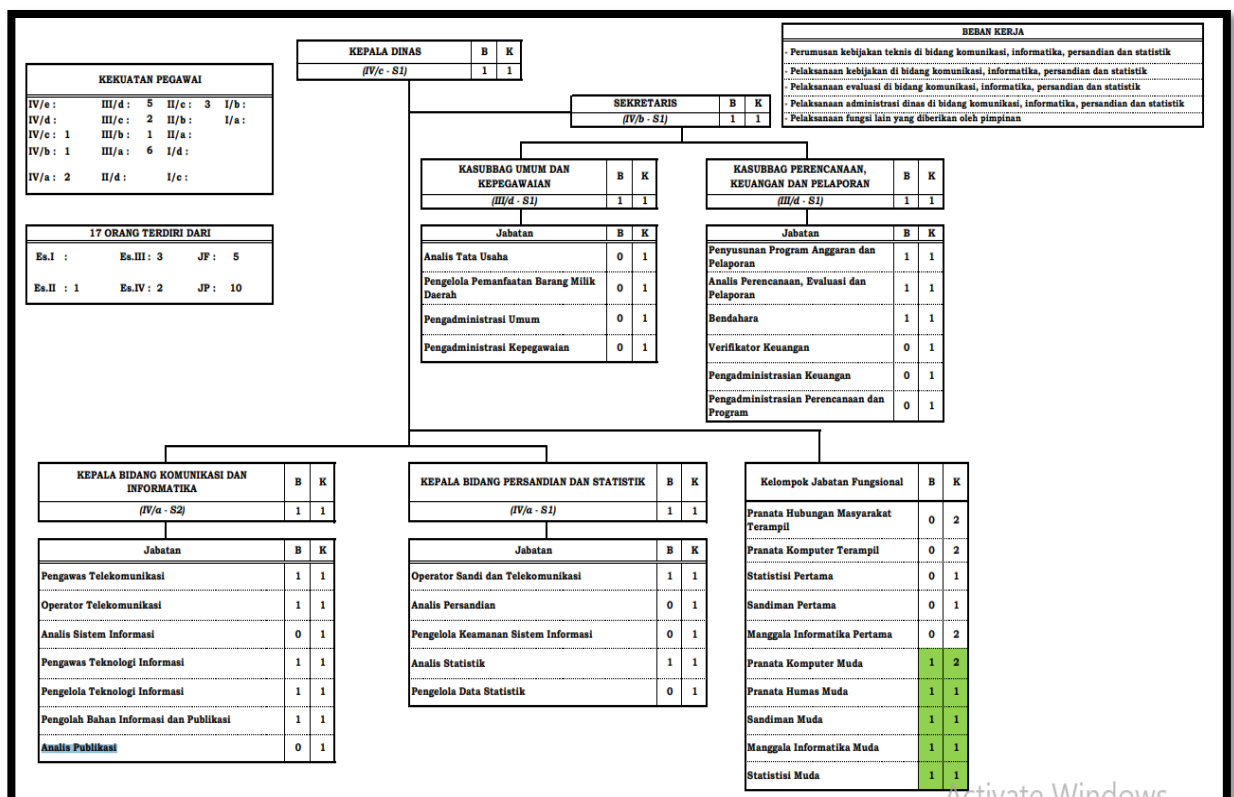
1. Sumber Daya Manusia / Aparatur Sipil Negara (ASN)

Dalam upaya melaksanakan tugas dan pokok pelayanan SOPD, Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukamara memiliki 21 orang ASN dan tenaga kontrak sebanyak 5 Orang yang terdiri :

- Kepala Dinas (Eselon II b) sebanyak 1 Orang;
- Sekretaris (Eselon III/a) sebanyak 1 Orang;
- Kepala Bidang (Eselon III/b) sebanyak 2 Orang;
- Jasa Fungsional Tetentu / eselon IV sebanyak 6 orang;dan
- Pelaksana sebanyak 11 orang.

Gambar 2.2

Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Peta Jabatan



Tabel 2.1
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan
Pendidikan yang ditamatkan

No	Uraian	S2	S1/D ₄	D3	SLTA	SLTP	Jumlah
1	Kepala Dinas		1				1
2	Sekretaris		1				1
3	Kepala Bidang	1	1				2
4	Kepala Seksi		6				6
5	Kepala Sub Bag		2				2
6	Pelaksana		6	3			9
Jumlah		1	17	3			21
Persentase		6 %	80%	14 %			100 %

Dari seluruh ASN Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian terdiri :

- Ijasah S2 = 6 %
- Ijasah S1 = 80 %
- Ijasah D3 = 14 %

2. Sumber daya lainnya berupa sarana dan prasarana perkantoran

Untuk memperlancar pekerjaan dan aktifitas Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian maka terdapat sumber daya lainnya yang merupakan belanja modal dan aset dari Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian. Data dapat di lihat dalam tabel 2.2

Tabel 2.2
Sarana dan Prasarana Perkantoran

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Jumlah	Perolehan
1	2	3	4
1	Sepeda Motor	1 unit	2008
2	Papan Nama Instansi	1 unit	2008
3	Sepeda Motor	1 unit	2010

4	Alat Rumah Tangga Lain-lain	1 set	2014
5	Lap Top	1 unit	2015
6	External/ Portable Hardisk	1 unit	2015
7	P.C Unit	1 unit	2016
8	Lap top	1 unit	2016
9	Laptop	1 unit	2016
10	Printer	1 unit	2016
11	Printer	1 unit	2016
12	Gerobak Dorong	1 unit	2017
13	Scanner	1 unit	2017
14	Lemari Besi	1 unit	2017
15	Lemari Kayu	1 unit	2017
16	Lemari Makan	1 unit	2017
17	papan Pengumuman	1 unit	2017
18	Meja 1/2 biro	3 unit	2017
19	Mesin Pemotong Rumput	1 unit	2017
20	A.C. Window	6 unit	2017
21	Kompor Gas	1 unit	2017
22	Dispenser	3 unit	2017
23	Kursi Pejabat Eselon II	1 buah	2017
24	Kursi Pejabat Eselon III	3 buah	2017
25	Proyektor	1 buah	2017
26	Faximili	1 unit	2017
27	PC	1 unit	2017
28	P.C Unit	2 unit	2017
29	Lap Top	1 unit	2017
30	Lap Top	1 unit	2017

31	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1 unit	2017
32	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1 unit	2017
33	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1 unit	2017
34	External/ Portable Hardisk	1 unit	2017
35	Peralatan Personal Komputer lainnya	1 unit	2017
36	Sepeda Motor	2 unit	2017
37	GPS	1 unit	2018
38	Lemari kayu	1 unit	2018
39	Filing Kabinet	1 unit	2018
40	Kipas Angin televesi	1 unit	2018
41	Soun System	1 unit	2018
42	Camera Video	1 unit	2018
43	Camera Video	1 unit	2018
44	Alat Pemadam/Portable Alat	1 unit	2018
45	Meja Kerja Pejabat Eselon	8 unit	2018
46	Meja Kerja Pegawai Non	12 unit	2018
47	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	1 unit	2018
48	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	3 unit	2018
49	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	1 unit	2018
50	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	3 unit	2018
51	Kursi Kerja Pegawai Non Struktura	13 unit	2018
52	Kursi Kerja Pegawai Non Struktura	1 unit	2018
53	Kursi Kerja Pegawai Non Struktura	13 unit	2018
54	Kursi Kerja Pegawai Non Struktura	1 unit	2018
55	Camera Elektronik	1 unit	2018
56	alat komunikasi radio ssb lainnya (dst)	2 unit	2018

57	alat komunikasi radio ssb lainnya (dst)	1 unit	2018
58	Antene VHF/FM Portable	1 unit	2018
59	peralatan antena vhf/fm lainnya (dst)	1 unit	2018
60	Teropong (Senjata Lain - Lain)	1 unit	2018
61	P.C Unit Lap Top Lap Top	1 unit	2018
62	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1 unit	2018
63	External/ Portable Hardisk	1 unit	2018
64	External/ Portable Hardisk	1 unit	2018
65	Peralatan Personal Komputer lainnya	1 unit	2018
66	Alat Komunikasi SSB	1 Paket	2018
67	Server	1 unit	2018
68	Router	1 unit	2018
69	Peralatan Jaringan lainnya	1 unit	2018
70	Peralatan Jaringan lainnya	1 unit	2018
71	Peralatan jaringan Lainnya	1 unit	2018
72	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	1 unit	2018
73	Sepeda Motor	1 unit	2018
74	Penyemprot Tangan (Hand Sprayer)	1 unit	2018
75	Kontainer	1 unit	2018
76	Kontainer	1 unit	2018
77	Kontainer	1 unit	2018
78	Alat Penghancur Kertas	1 unit	2018
79	Mesin Absensi	1 unit	2018
80	Mesin Absensi	1 unit	2018
81	Papan Pengumuman	1 unit	2018

82	Kursi Besi	1 unit	2018
83	Meja rapat	1 unit	2018
84	Meja 1/2 biro	1 unit	2018
85	Kursi Rapat	1 unit	2019
86	Kursi Putar	1 unit	2019
87	Lemari Es	1 unit	2019
88	Ac SPLIT	1 unit	2019
89	Ac SPLIT	1 unit	2019
90	Ac SPLIT Split Televisi	1 unit	2019
91	Dispenser	1 unit	2019
92	Gorden	1 unit	2019
93	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1 unit	2019
94	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1 unit	2019
95	Unit Tranceiver Ssb Transportable	1 unit	2019
96	Unit Tranceiver Ssb Transportable	1 unit	2019
97	Unit Tranceiver Ssb Transportable	1 unit	2019
98	Unit Tranceiver HF Portable	1 unit	2019
99	Mainframe (Komputer Jaringan)	1 unit	2019
100	Lap Top	1 unit	2019
101	Lap Top	1 unit	2019
102	Monitor	1 unit	2019
103	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1 unit	2019
104	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1 unit	2019
105	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1 unit	2019

106	Server	1 unit	2019
107	Router	1 unit	2019
108	Router	1 unit	2019
109	tenda	1 unit	2019
110	Scooter	1 unit	2020
111	Scooter	1 unit	2020
112	Microphone	1 unit	2020
113	Microphone/Wireless MIC	1 unit	2020
114	Microphone/Wireless MIC	1 unit	2020
115	Digital Audio Taperecorder	1 unit	2020
116	peralatan studio audio lainnya (dst)	1 unit	2020
117	Camera Electronic	1 unit	2020
118	Camera Electronic	1 unit	2020
119	Camera Electronic	1 unit	2020
120	Tripod Camera Tripod Camera Lensa Kamera Lensa Kamera Handy Talky (HT)	1 unit	2020
121	Portable Noise Monitoring	1 unit	2020
122	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1 unit	2020
123	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1 unit	2020
124	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1 unit	2020
125	Peralatan Personal Komputer lainnya	1 unit	2020
126	Peralatan Personal Komputer lainnya	1 unit	2020
127	Peralatan Personal Komputer lainnya	1 unit	2020
128	Peralatan Jaringan lainnya	1 unit	2020
129	Alat Studio Lainnya	1 unit	2021

130	Lap Top	1 unit	2021
131	Peralatan Jaringan lainnya Peralatan Jaringan lainnya Peralatan Jaringan lainnya	1 unit	2021
132	Peralatan Jaringan lainnya	1 unit	2021
133	Peralatan Jaringan lainnya	1 unit	2021
134	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	1 unit	2022
135	Lemari Kayu	6 buah	2022
136	Lemari Kaca	1 Buah	2022
137	Medsin Penghisap Debu	1 Buah	2022
138	Mesin Pemotong Rumput	1 Buah	2022
139	Tiang Bendera	20 batang	2022
140	Tangga Aluminium	1 unit	2022
141	Alat Rumah Tangga	1 unit	2022
142	Video Monitor/video tron	1 unit	2022
143	PC Unit	1 unit	2022
144	PC Unit	1 unit	2022
145	Laptop	1 unit	2022
146	Laptop	1 unit	2022
147	Printer (Peralatan Personal) printer	1 unit	2022
148	Printer (Peralatan Personal) printer	1 unit	2022
149	Scaner	1 unit	2022
150	Server	1 unit	2022
151	Peralatan Jaringan lainnya	1 unit	2022
152	Peralatan Jaringan lainnya	1 unit	2022
153	Peralatan Komputer lainnya	1 unit	2022
154	Peralatan Komputer lainnya	1 unit	2022
155	Lemari Kayu	1 unit	2022
156	Dispenser Dispenser P.C Unit	1 unit	2022

157	P.C Unit	1 unit	2022
158	Lap Top	1 unit	2022
159	Peralatan Jaringan lainnya	1 unit	2022
160	Peralatan Jaringan lainnya	1 unit	2023
161	Electric generating set lainnya (dst)	1 unit	2023
162	Sepeda Motor	1 unit	2023
163	Meja Rapat	1 unit	2023
164	Meja Resepsionis	1 unit	2023
165	Kursi Tamu Kursi Putar A.C. Split A.C. Spli	1 unit	2023
166	Vertikal Blind	1 unit	2024
167	KURSI Kera Eselon III	1 unit	2024
168	Video Monitor	1 unit	2024
169	Video Monitor	1 unit	2024
170	Video Switcer	1 unit	2024
171	Alat Studio Lainnya	1 unit	2024
172	Alat komunikasi radio ssb lainnya (dst)	1 unit	2024
173	PC Unit	1 unit	2024
174	PC Unit	1 unit	2024
175	Laptop	1 unit	2024
176	Hard disk	1 unit	2024
177	Speaker Komputer	1 unit	2024
178	Printer (Peralatan Personal Komputer) Rak Server	1 unit	2024
179	Peralatan jaringan Lainnya	1 unit	2024
180	Peralatan jaringan Lainnya	1 unit	2024
181	Kursi Besi/Metal	30 Buah	2024

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukamara diarahkan untuk mencapai tujuan penyelenggaraan urusan pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian. Tugas pokok dan fungsinya mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Selain itu Peraturan yang menjadi acuan adalah Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika, Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 09 tahun 2009, Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 8 tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Pemerintahan Daerah di bidang Persandian dan Peraturan Lembaga Sandi Negara Nomor 9 tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Persandian.

Sebelum berdiri sendiri sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada lingkup Pemerintah Kabupaten Sukamara, urusan pemerintahan Bidang Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Sukamara sebelumnya di jalankan oleh 4 (empat) OPD yaitu :

1. Dinas Perhubungan, Komunikasi Informatika Budaya dan Pariwisata Kabupaten Sukamara (Bidang Komunikasi dan Informatika);
2. Biro Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Sukamara;
3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sukamara (Bidang Statistik);
4. Biro Umum (Bidang Sandi dan Telekomunikasi).

Setelah resmi berdiri sendiri sebagai OPD baru, kewenangan Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian

pada keempat OPD tersebut berpindah ke Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukamara

<div>Tabel 2.3</div> <div>Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian</div>						
NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	REALISASI			
			2021	2022	2023	2024
	INDIKATOR KINERJA KUNCI					
I	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					
	Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	PERSENTASE	86,6%	86,6%	86,6%	86,6%
	Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online Dan Terintegrasi	PERSENTASE	30%	30%	30%	30%
	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	PERSENTASE	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%
II	URUSAN STATISTIK					
	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	PERSENTASE	100%	100%	100%	100%
	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	PERSENTASE	100%	100%	100%	100%
III	URUSAN PERSANDIAN					
	Tingkat keamanan informasi pemerintah	ANGKA	40	40	40	40

2.1.3 Kelompok Sasaran Pelayanan

Dalam menjalankan tugas dan fungsi di Bidang Informasi, Komunikasi Persandian , Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukamara menjalin kerja sama dan memberikan pelayanan kepada beberapa stakeholder dan masyarakat yang diuraikan sebagai berikut:

1. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Memberikan pelayanan terkait publikasi data dan kinerja per OPD
2. Badan Pusat Statistik (BPS) Kerja sama dalam melaksanakan program Satu Data;
3. Memberikan akses seluas-luasnya terhadap masyarakat untuk mendapatkan data valid yang dipublikasi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

2.2 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Penyusunan Rencana Strategis diarahkan dalam rangka mencapai visi dan misi organisasi, sebagaimana diamanatkan Inpres 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang mewajibkan kepada tiap-tiap Instansi pemerintah untuk menyusun Rencana Strategis.

Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini maka Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukamara dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

2.2.1 Permasalahan

1. Masih Kurang SDM pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian
2. Kurangnya kompetensi aparatur sipil negara yang melakukan fungsi Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian sehingga masih perlu ditingkatkan;

3. Kewenangan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian dalam menghimpun dan mengakses informasi penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan internal pemerintah belum sepenuhnya dapat menampung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Komunikasi, Informatika, Bidang Statistik dan Bidang Persandian;
4. Apatisme sebagian masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerah;
5. Masih kurangnya akses masyarakat terhadap informasi penyelenggaraan pemerintahan;
6. Masih tingginya kesenjangan digital di wilayah Sukamara yang disebabkan oleh ketimpangan dan perbedaan akibat ketidak seimbangan pertumbuhan TIK yang dipengaruhi oleh tidak meratanya pembangunan infrastruktur informasi dan komunikasi serta regulasi pendukung;
7. Belum terintegrasinya database dan layanan e-Government Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;
8. Pelaksanaan Statistik Sektoral yang belum maksimal;
9. Potensi penyalahgunaan website dan informasi penyelenggaraan pemerintahan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

2.2.2 Isu Strategis

Tabel 2.4
Isu Strategis Dinas Kominfosandi

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN	ISU YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Masih rendahnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Kurang Sarana dan Prasarana pendukung pelaksanaan penyeleggaraan Pemerintah yang berbasis SPBE	Kesulitan dalam mendapatkan piranti elektronik untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahn berbasis SPBE dikarenakan sebagian besar produk luar negeri	Keterbatasan perangkat elektronik produksi dalam negeri yang mendukung penyelenggaraan Pemerintah Berbasis SPBE	Mahal dan fluktuasi Harga yang menyebabkan kesulitan mendapatkan perangkat elektronik pendukung penyelenggaraan pemerintah berbasis SPBE	Efektivitas birokrasi dan penerapan Teknologi

URUSAN STATISTIK	Masih rendahnya pemanfaatan dan pengamanan data statistik sektoral	Kurang Sarana dan Prasarana pendukung pelaksanaan penyeleggaraan Pemerintah yang berbasis SPBE	Kesulitan mendapatkan data yang berkualitas	Setiap KL/Perangkat Daerah mempunyai data sendiri	Setiap KL/Perangkat daerah mempunyai data sendiri atau belum memiliki single data	Efektivitas birokrasi dan penerapan Teknologi
URUSAN PERSANDIAN	Masih rendahnya pemanfaatan dan pengamanan data statistik sektoral	Kurang Sarana dan Prasarana pendukung pelaksanaan penyeleggaraan Pemerintah yang berbasis SPBE	Kesulitan dalam mendapatkan piranti elektronik untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahn berbasis SPBE dikarenakan sebagian besar produk luar negeri	Kesulitan dalam mendapatkan piranti elektronik untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahn berbasis SPBE dikarenakan sebagian besar produk luar negeri	Kesulitan dalam mendapatkan piranti elektronik untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahn berbasis SPBE dikarenakan sebagian besar produk luar negeri	Efektivitas birokrasi dan penerapan Teknologi

BAB III

TUJUAN SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan, Sasaran Dan Indikator Renstra Tahun 2025-2029

Tujuan yang akan dicapai Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukamara adalah sebagai berikut:

Tujuan

1. Terwujudnya Transformasi Layanan Publik Berbasis Digital,
2. Terwujudnya Layanan Statistik Yang Akurat Dan Dapat Diandalkan,
3. Meningkatnya Keamanan Informasi Meningkatkan pelayanan publik yang transparan,
4. aspiratif dan partisipatif melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi;

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai secara berkesinambungan dan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Adapun sasaran yang akan dicapai, serta hubungannya dengan tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukamara adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Optimalisasi Dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Yang Berbasis SPBE (Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik)
2. Tersedianya Satu Data Daerah Yang Mudah Diakses Masyarakat
3. Meningkatnya Pemahaman Tentang Keamanan Data dan Informasi
4. Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah yang Akuntabel

Tabel 3.1
Tujuan, Sasaran dan Indikator

NO	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
					2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Meningkatkan Profesionalisme dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Terwujudnya Transformasi Layanan Publik Berbasis Digital	Meningkatnya Optimalisasi Dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Yang Berbasis SPBE (Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik)	Persentase aplikasi umum SPBE yang digunakan oleh Pemerintah Daerah	100	100	100	100	100

	Meningkatkan Profesionalisme dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Terwujudnya Transformasi Layanan Publik Berbasis Digital	Meningkatnya Optimalisasi Dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Yang Berbasis SPBE (Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik)	Persentase Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) yang melaksanakan diseminasi informasi Kebijakan dan Program Prioritas Nasional dan Prioritas Daerah	100	100	100	100	100
II	Meningkatkan Profesionalisme dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Terwujudnya Layanan Statistik Yang Akurat Dan Dapat Diandalkan,	Tersedianya Satu Data Daerah Yang Mudah Diakses Masyarakat	Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun	100	100	100	100	100

				perencanaan pembangunan daerah					
III	Meningkatkan Profesionalisme dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Meningkatnya Keamanan Informasi	Meningkatnya Pemahaman Tentang Keamanan Data dan Informasi	Persentase personil bidang keamanan siber dan sandi yang mempunyai sertifikat pelatihan teknis	50	50	50	50	50
IV	Meningkatkan Profesionalisme dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah yang Akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	65	68	69	69	75

3.2 Arah Kebijakan Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029

Tabel 3.2

Arah Kebijakan Perangkat Daerah Tahun 2026-2030

NO	URUSAN	TAHAP I 2026	TAHAP II 2027	TAHAP III 2028	TAHAP IV 2029	TAHAP V 2030
1	2	3	4	5	6	7
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					
	2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					
		Melaksanakan kerjasama dengan media elektronik dan cetak dalam menyelenggarakan desiminasi informasi	Melaksanakan kerjasama dengan media elektronik dan cetak dalam menyelenggarakan desiminasi informasi	Melaksanakan kerjasama dengan media elektronik dan cetak dalam menyelenggarakan desiminasi informasi	Melaksanakan kerjasama dengan media elektronik dan cetak dalam menyelenggarakan desiminasi informasi	Melaksanakan kerjasama dengan media elektronik dan cetak dalam menyelenggarakan desiminasi informasi
		Melaksanakan pembinaan	Melaksanakan pembinaan Komunitas	Melaksanakan pembinaan Komunitas	Melaksanakan pembinaan Komunitas	Melaksanakan pembinaan

		Komunitas Informasi Masyarakat (KIM)	Informasi Masyarakat (KIM)	Informasi Masyarakat (KIM)	Informasi Masyarakat (KIM)	Komunitas Informasi Masyarakat (KIM)
		Melaksanakan desiminasi Informasi melalui media Pemerintah Daerah (www.sukamarakab.go.id)	Melaksanakan desiminasi Informasi melalui media Pemerintah Daerah (www.sukamarakab.go.id)	Melaksanakan desiminasi Informasi melalui media Pemerintah Daerah (www.sukamarakab.go.id)	Melaksanakan desiminasi Informasi melalui media Pemerintah Daerah (www.sukamarakab.go.id)	Melaksanakan desiminasi Informasi melalui media Pemerintah Daerah (www.sukamarakab.go.id)
		Melaksanakan Bimtek Komunikasi Publik	Melaksanakan Bimtek Komunikasi Publik	Melaksanakan Bimtek Komunikasi Publik	Melaksanakan Bimtek Komunikasi Publik	Melaksanakan Bimtek Komunikasi Publik
II	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					
		Melaksanakan pemanfaatan data nasional	Melaksanakan pemanfaatan data nasional	Melaksanakan pemanfaatan data nasional	Melaksanakan pemanfaatan data nasional	Melaksanakan pemanfaatan data nasional
		Melaksanakan manajemen dan koordinasi tentang	Melaksanakan manajemen dan koordinasi tentang	Melaksanakan manajemen dan koordinasi tentang	Melaksanakan manajemen dan koordinasi tentang	Melaksanakan manajemen dan koordinasi tentang

		Doomain dan Sub Domain	Doomain dan Sub Domain	Doomain dan Sub Domain	Doomain dan Sub Domain	Doomain dan Sub Domain
		Melaksanakan pengembangan aplikasi daerah dan sinkronisasi dengan aplikasi daerah	Melaksanakan pengembangan aplikasi daerah dan sinkronisasi dengan aplikasi daerah	Melaksanakan pengembangan aplikasi daerah dan sinkronisasi dengan aplikasi daerah	Melaksanakan pengembangan aplikasi daerah dan sinkronisasi dengan aplikasi daerah	Melaksanakan pengembangan aplikasi daerah dan sinkronisasi dengan aplikasi daerah
		Melaksanakan pemetaan data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah	Melaksanakan pemetaan data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah	Melaksanakan pemetaan data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah	Melaksanakan pemetaan data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah	Melaksanakan pemetaan data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah
		Melaksanakan koordinasi dalam rangka pemanfaatan Pusat Data Nasional	Merlaksanakan koordinasi dalam rangka	Merlaksanakan koordinasi dalam rangka pemanfaatan Pusat Data Nasional	Merlaksanakan koordinasi dalam rangka	Merlaksanakan koordinasi dalam rangka pemanfaatan Pusat Data Nasional

			pemanfaatan Pusat Data Nasional		pemanfaatan Pusat Data Nasional	
		Melaksanakan Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Melaksanakan Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Melaksanakan Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Melaksanakan Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Melaksanakan Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE
		Melaksanakan Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Melaksanakan Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Melaksanakan Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Melaksanakan Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Melaksanakan Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi
		Menyediakan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Menyediakan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Menyediakan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Menyediakan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Menyediakan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE

		Melaksanakan koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Melaksanakan koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Melaksanakan koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Melaksanakan koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Melaksanakan koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah
		Melaksanakan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	Melaksanakan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	Melaksanakan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	Melaksanakan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	Melaksanakan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas

	2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					
		Melaksanakan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Melaksanakan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Melaksanakan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Melaksanakan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Melaksanakan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral
		Melaksanakan Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Melalui Forum Satu Data Daerah	Melaksanakan Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Melalui Forum Satu Data Daerah	Melaksanakan Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Melalui Forum Satu Data Daerah	Melaksanakan Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Melalui Forum Satu Data Daerah	Melaksanakan Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Melalui Forum Satu Data Daerah
III	URUSAN PERSANDIAN					
	2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					
		Melaksanakan kegiatan pengamanan Informasi	Melaksanakan kegiatan pengamanan Informasi	Melaksanakan kegiatan pengamanan Informasi Pemerintahan Daerah	Melaksanakan kegiatan pengamanan Informasi	Melaksanakan kegiatan pengamanan Informasi Pemerintahan Daerah

		Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
		Terlaksananya Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Terlaksananya Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Terlaksananya Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Terlaksananya Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Terlaksananya Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah
		Terlaksananya Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	Terlaksananya Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	Terlaksananya Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	Terlaksananya Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	Terlaksananya Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan

3.3 KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026-2030

TABEL 3.3
Kebijakan Perangkat Daerah Tahun 2026 - 2030

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah	Ket
I	Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika	Masih rendahnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Melaksanakan dan penekanan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah berbasis SPBE (Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik)	
II	Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 tahun 2019 Tentang Norma , Standar , Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektoral Oleh Pemerintah Daerah	Masih rendahnya pemanfaatan dan pengamanan data statistik sektoral	Penyusunan data dan metadata statistik sektoral dengan metodologi survai dan pengumpulan data	

III	Peraturan Badan Siber Dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah daerah	Masih rendahnya pemanfaatan dan pengamanan data statistik sektoral	Melaksanakan pembinaan keamanan informasi dan persandian daerah	
-----	---	--	---	--

BAB IV

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA RENCANA PENDANAAN

Program-program tersebut dituangkan dalam bentuk matrik/tabel yang menggambarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif seperti pada tabel 4.1.

4.1 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2026 - 2030

Tabel 4.1																
Rencana Program / Kegiatan / Sub Kegiatan dan Pendanaan																
BIDANG URUSAN /PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
					TAHUN 2026		TAHUN 2027		2028		2029		2030			
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH																
PROGRAM PENUNJANG KEUANGAN PERANGKAT DAERAH																
2.16.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																
	2.16.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	30	30	3.200.000.000	30	3.300.000.000	30	3.300.000.000	30	3.300.000.000	30	3.500.000.000	
	2.16.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	8	8	50.000.000	8	50.000.000	8	50.000.000	8	50.000.000	8	50.000.000	
	2.16.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	2	2	25.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	
	2.16.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	2	2	25.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	
	2.16.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	2	2	25.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	

2.16.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah															
2.16.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	
2.16.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	1	20.000.000	3	20.000.000	3	20.000.000	3	20.000.000	3	20.000.000	
2.16.01.2.03.0007 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	2	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	
2.16.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah															
2.16.01.2.04.0001 Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tersedianya Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	
2.16.01.2.04.0006 Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Tersedianya Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	Dokumen	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	
2.16.01.2.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen	1	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	
2.16.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah															
2.16.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	27	27	30.000.000	27	30.000.000	27	30.000.000	27	30.000.000	27	30.000.000	
2.16.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	2	0	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	2	103.411.092	2	20.000.000	
2.16.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	5	0	300.000.000	40	400.000.000	50	500.000.000	5	500.000.000	30	300.000.000	

2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah																
2.16.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	2	2	15.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000		
2.16.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	199.000.000	
2.16.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	20.000.000	
2.16.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	3	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	100.000.000	
2.16.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	2	15.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000	15.000.000	
2.16.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	8	8	10.000.000	8	10.000.000	8	10.000.000	8	10.000.000	8	10.000.000	10.000.000	
2.16.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	2	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	10.000.000	
2.16.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	15	80	400.000.000	60	300.000.000	60	300.000.000	100	500.000.000	120	600.000.000		

2.16.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah															
2.16.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	0	2	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	0	0	1	350.000.000	
2.16.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	0	2	54.395.069	2	50.000.000	0	0	1	350.000.000	0	0	
2.16.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	1	5	50.000.000	5	50.000.000	5	250.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	
2.16.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	1	150.000.000	1	150.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	300.000.000	
2.16.01.2.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	0	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	
2.16.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	1	150.000.000		150.000.000		350.000.000		400.000.000			
2.16.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	199.000.000	
2.16.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	199.000.000	
2.16.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															
2.16.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	4	1.000.000	4	1.000.000	4	1.000.000	4	1.000.000	4	1.000.000	
2.16.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	36	36	180.000.000	36	180.000.000	36	180.000.000	36	180.000.000	36	180.000.000	

	2.16.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	
	2.16.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	3	3	80.000.000	3	80.000.000	3	80.000.000	3	80.000.000	3	80.000.000	
2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																
	2.16.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	17	17	150.000.000	17	150.000.000	17	150.000.000	17	150.000.000	17	150.000.000	
	2.16.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	0	25	75.000.000	25	75.000.000	25	75.000.000	25	75.000.000	25	175.000.000	200.000.000
	2.16.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	150.000.000	50.000.000
	2.16.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	0	0	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	0	150.000.000	98.881.647
	2.16.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	0	0	1	145.914.823	1	50.000.000	1	50.000.000	0	150.000.000	0
2.16.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																
	2.16.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	3	10.000.000	3	10.000.000	3	10.000.000	3	10.000.000	3	10.000.000	

2.16.01.2.01.0006 Koor dinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	2	15.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000	
2.16.01.2.01.0007 Eval uasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	Hapus
2.16.01.2.01.0008 Peny elenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	30	30	25.000.000	30	25.000.000	30	25.000.000	30	25.000.000	30	25.000.000	
URUSAN KOMUNIKASI INFORMATIKA															
2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA															
2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota															
2.16.03.2.02.0013 Ko ordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	Terlaksananya koordinasi dalam rangka pemanfaatan Pusat Data Nasional	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional	Aplikasi	0	1	10.000.000	1	10.000.000	1	0	1	10.000.000	1	10.000.000	
2.16.03.2.02.0019 Koor dinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Terlaksananya Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Dokuman	2	2	392.870.782	2	300.000.000	2	150.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	Hapus
2.16.03.2.02.0024 Peny elenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Terlaksananya Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	PD	30	26	260.000.000	26	240.000.000	26	110.000.000	26	60.000.000	26	73.201.265	Hapus

	2.16.03.2.02.0025 Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Terlaksananya Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	Layanan	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	
	2.16.03.2.02.0026 Fasilitas penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Terlaksananya Fasilitas penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Dokumen	0	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	
	2.16.03.2.02.0032 Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPB	Terlaksananya pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE	Aplikasi	1	1	150.000.000	1	150.000.000	1	250.000.000	1	257.334.539	1	250.000.000	
	2.16.03.2.02.0034 Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan	Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Aplikasi	0	0	10.000.000	0	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	Hapus
	2.16.03.2.02.0036 Penyediaan Akses Internet	Terlaksananya Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	Perangkat Daerah	26	26	1.400.000.000	26	1.537.514.321	26	1.550.000.000	26	1.800.000.000	26	2.150.000.000	Hapus

	2.16.03.2.02.0037 Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Terlaksananya koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Dokuman	3	2	150.000.000	2	200.000.000	2	218.890.037	2	160.000.000	1	60.000.000	
	2.16.03.2.02.0038 Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	Dokumen	2	2	100.000.000	2	120.000.000	2	250.000.000	2	200.000.000	2	150.000.000	Hapus
	2.16.03.2.02.0039 Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	Terlaksananya koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah		1	1	100.000.000	1	120.000.000	1	250.000.000	1	200.000.000	1	150.000.000	
2.16.03.2.01 Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																
	2.16.03.2.01.0004 Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Terlaksananya Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	laporan	1	1	100.000.000	1	120.000.000	1	150.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	
2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK																
2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																
	2.16.02.2.01.0014 Relasi Media	Terlaksananya Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	laporan	14	14	1.175.392.000	14	1.200.000.000	14	1.300.000.000	14	1.400.000.000	14	1.400.000.000	

	2.16.02.2.01.0015 Kem itraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Terlaksananya Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	komunitas	76	25	40.000.000	25	50.000.000	25	50.000.000	25	50.000.000	25	50.000.000	
	2.16.02.2.01.0016 Du kungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Terlaksananya Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika	Laporan	0	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	
	2.16.02.2.01.0017 Pela yanan Informasi Publik	Tersedianya Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	Permohonan	5	5	50.000.000	5	57.161.600	5	32.519.680	5	11.645.664	5	94.727.947	
	2.16.02.2.01.0019 Mo nitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Terlaksananya Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	Rekomendasi	0	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	
	2.16.02.2.01.0020 Dise minasi Informas	Terlaksananya Diseminasi Informasi	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	Persentase	90	90	50.000.000	90	50.000.000	90	50.000.000	90	50.000.000	90	50.000.000	
	2.16.02.2.01.0021 Peng elolaan Media Komunikasi Publik	Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	Media	8	8	50.000.000	8	60.000.000	8	70.000.000	8	70.000.000	8	70.000.000	
	2.16.02.2.01.0024 Peng uatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	umlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	orang	5	5	50.000.000	5	70.000.000	5	60.000.000	5	60.000.000	5	60.000.000	

URUSAN STATISTIK															
2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL															
2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota															
	2.20.02.2.01.0020 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	Orang	10	10	200.243.371	10	172.755.539	10	196.363.316	10	221.212.982	10,00	197.273.631
	2.20.02.2.01.0022 Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Terlaksananya Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Melalui Forum Satu Data Daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah	laporan	2	2	250.000.000	5	300.000.000	5	300.000.000	5	300.000.000	5	350.000.000
URUSAN PERSANDIAN															
2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI															
2.21.02.2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota															
	2.21.02.2.01.0005 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Terlaksananya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	umlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Laporan	12	12	400.000	12	300.000	12	400.000	12	400.000	12	500.000
	2.21.02.2.01.0006 Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	Terlaksananya Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	Laporan	12	12	935.534.355	12	1.052.311.072	12	974.926.626	12	1.003.672.957	12	938.856.605
	2.21.02.2.01.0007 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Tersedianya Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian	PD	0	30	700.000.000	30	800.000.000	30	900.000.000	30	1.000.000.000	30	1.100.000.000

	2.21.02.2.01.0008	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Ditetapkannya Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian	Dokumen	0	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	
2.21.02.2.02 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota																	
	2.21.02.2.02.0002	Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Terlaksananya Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi	Kegiatan	0	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	

4.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025-2030

Tabel 4.2
Indikator Kinerja Utama tahun 2025 - 2026

NO	INDIKATOR	SAT	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Indeks SPBE	Indeks	2,75	2,76	2,84	2,9	3	3,1	
2	Indeks Pembangunan Statistik(IPS)	Angka	75	76	78	80	82	85	
3	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	Indeks	11,76	15,76	16	17	17	18	
4	Indeks Pengelolaan Informasi Publik	Angka	75	76	78	80	82	85	

4.3 INDIKATOR KINERJA DAERAH TAHUN 2025-2030

Tabel 4.3
Indikator Kinerja Daerah Tahun 2025 - 2026

NO	INDIKATOR	SAT	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
I	Urusan Komunikasi dan Informatika								
1.1	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan	Persentase	100	100	100	100	100	100	
1.2	Cakupan layanan telekomunikasi	Indeks	50	60	70	80	90	100	
1.3	Persentase pelayanan publik yang sudah terintegrasi	Angka	50	60	70	80	90	100	
1.4	Jumlah sarana information center	Jumlah	0	1	1	1	1	1	
II	Urusan Statistik								
2.1	Tersedianya sistem data statistik yang terintegrasi	Ada/tidak ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	
2.2	Buku kabupaten dalam angka	Ada/tidak ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	
III	Urusan Persandian								
3.1	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	Persentase	58	60	62	64	66	68	

4.3 INDIKATOR KINERJA KUNCI DISKOMINFOSANDI TAHUN 2025-2030

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Kunci Diskominfosandi Tahun 2025 - 2026

NO	INDIKATOR	SAT	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
I	Urusan Komunikasi dan Informatika								
1.1	Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persentase	86,6	86,6	86,6	86,6	86,6	86,6	
1.2	Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online Dan Terintegrasi	Persentase	30	35	40	45	50	50	
1.3	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase	12	15	20	25	30	40	
II	Urusan Statistik								
2.1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persentase	100	100	100	100	100	100	
2.2	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Persentase	100	100	100	100	100	100	
III	Urusan Persandian								
3.1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Angka	11,76	15,76	16	17	17	18	

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukamara Tahun 2025 — 2029 telah disusun berdasar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyusunan Renstra sudah dilakukan melalui berbagai tahapan, termasuk interaksi dengan para pemangku kepentingan Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian di Kabupaten Sukamara, partisipasi seluruh unit kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukamara, serta dengan mempertimbangkan capaian kinerja pembangunan Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang berada pada empat OPD sebelumnya hingga saat ini.

Dengan demikian, Renstra Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukamara telah mengakomodasikan semua tugas dan fungsi yang menjadi tanggungjawabnya, memelihara kesinambungan dan keberlanjutan program, memenuhi aspirasi pemangku kepentingan dan masyarakat, serta mengantisipasi masa depan.

Renstra menjabarkan visi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukamara beserta rencana sasaran pembangunan dalam rangka mencapai sasaran program Kepala Daerah Kabupaten Sukamara. Dengan demikian Renstra menggambarkan secara jelas keterkaitan antara sasaran Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukamara, sasaran program, dan sasaran kegiatan, rincian indikator, serta memantapkan penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) untuk meningkatkan mutu keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) guna mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN).

Dengan disusunnya Renstra Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukamara Tahun 2025 - 2029, diharapkan perencanaan pembangunan bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, dan hasilnya dapat terlaksana sesuai dengan yang

diharapkan. Akhirnya semoga Revisi Renstra ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.